



BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

2025-2029

RENCANA STRATEGIS

(0552) 2034391

bmpkaltara.kemdikbud.go.id

Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat-Nya, maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024-2025 dapat terselesaikan. Penyusunan Renstra merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu pengeluaran (output) dan hasil (outcome) dalam pemanfaatan anggaran. Renstra akan menjadi acuan (guidance) pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pemimpin unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin akuntabel (accountable).

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan nasional, pemerintah selama ini telah berupaya untuk mewujudkan mutu pendidikan melalui pemikiran teoritis yang sifatnya mendasar yang dipergunakan sebagai landasan dalam menyusun perencanaan pendidikan atau framework untuk penyelenggaraan pendidikan nasional. Oleh karena itu, BPMP Provinsi Kalimantan Utara sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sebagaimana amanah PERPRES Nomor 14 Tahun 2015 pasal 32 adalah untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah khususnya bidang peningkatan mutu pendidikan. BPMP Provinsi Kalimantan Utara sebagai UPT penjaminan mutu pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan mutu pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara.

Akhir kata, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Tanjung Selor, Oktober 2025

Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara



A handwritten signature in green ink, appearing to read 'Andrianus Hendro Triatmoko'.

Andrianus Hendro Triatmoko, S.T., M.T.
NIP. 198004182003121004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum.....	2
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	15
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS.....	19
2.1 Visi dan Misi.....	19
2.2 Tujuan dan Indikator Tujuan.....	20
2.3 Sasaran Strategis.....	22
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	25
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.....	24
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPMP Provinsi Kalimantan Utara	26
3.3 Kerangka Regulasi.....	30
3.4 Kerangka Kelembagaan.....	30
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	38
4.1 Target Kinerja	38
4.2 Kerangka Pendanaan.....	42
BAB V PENUTUP.....	44
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang ditetapkan dengan Undang-Undang 59 Tahun 2024, bahwa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, salah satu misi (agenda) pembangunan yang akan dilaksanakan adalah Transformasi Sosial, yaitu untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.

Dalam rangka mewujudkan asta cita yang ke-4 yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas yang diturunkan melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) berupa Revitalisasi Sekolah, Digitalisasi Pembelajaran, Makan bergizi Gratis (MBG) dan Program Prioritas Nasional berupa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Wajib Belajar 13 Tahun dan Penuntasan Anak Tidak Sekolah (ATS), Penguatan Karakter, Pembelajaran dan Penilaian, Penjaminan Mutu Pendidikan maka, BPMP Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen dan mendukung upaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui penyediaan layanan pendidikan bermutu untuk semua. Pendidikan bermutu untuk semua diperlukan untuk dapat memberikan kesempatan pendidikan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang aspek kewilayahan, gender, kelompok ekonomi-sosial-budaya, serta memberikan pengalaman pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara holistik dan terpadu. Pendidikan bermutu diharapkan menghasilkan lulusan pendidikan yang berkualitas, yang berkeimanan dan berketakwa terhadap Tuhan YME, berkewarganegaraan, bernalar kritis, kreatif, kolaboratif, mandiri, sehat, dan komunikatif. Untuk itu, diperlukan adanya perencanaan berkualitas yang memuat arah kebijakan, strategi dan program prioritas, yang akan memastikan pelaksanaan pembangunan pendidikan dilaksanakan secara berkesinambungan, partisipatif, dan tepat sasaran.

Rencana Strategis BPMP Provinsi Kalimantan Utara periode 2025 – 2029 disusun berdasarkan Rencana Strategis Ditjen Paud, Dikdas, dan Dikmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah periode 2025 - 2029 yang berpedoman kepada teknis penyusunan rencana strategis Kementerian/Lembaga yang diatur oleh Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029. Rencana Strategis BPMP Provinsi Kalimantan Utara memuat rumusan sasaran program dan kegiatan dengan mengacu kepada kebijakan dan strategi, tujuan, sasaran strategis, serta program dan kegiatan Rencana Strategis Ditjen Paud, Dikdas, dan Dikmen sebagai payung bagi Unit Pelaksana Teknis di daerah agar dapat melaksanakan langkah-langkah perlu dilakukan, menyinergikan fungsi dan peran, serta melaksanakan kolaborasi dan kerja sama antar pihak dalam mendorong terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua.

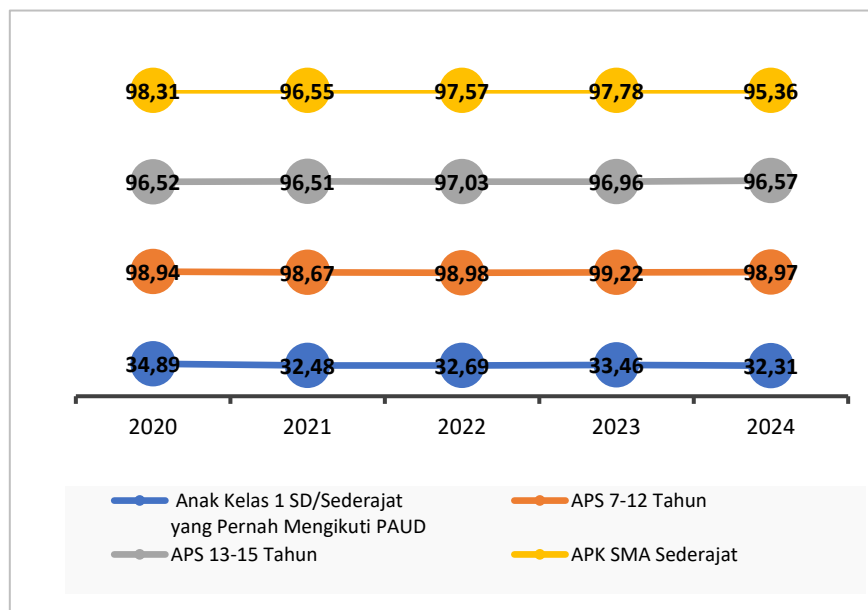
Rencana Strategis BPMP Provinsi Kalimantan Utara juga diharapkan dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan pendidikan, dan mitra pembangunan pendidikan dalam menyusun strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Dengan rencana yang disusun, dan memastikan untuk dapat dilaksanakan secara sungguh - sungguh, terpadu, sinergis dan kolaboratif tersebut, BPMP Provinsi Kalimantan Utara dapat secara optimal mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang sejalan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

1.1 Kondisi Umum

1.1.1 Partisipasi Pendidikan

Berbagai upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Wajib Belajar 13 (tiga belas) Tahun telah menunjukkan hasil yang baik. Secara umum, Provinsi Kalimantan Utara dapat mempertahankan dan terus meningkatkan angka partisipasi di berbagai jenjang. Seperti ditunjukkan pada Gambar 1, terdapat kondisi yang sudah mencapai tingkatan optimal, yang ditunjukkan dengan capaian pada tahun 2024 untuk Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7 (tujuh)-12 (dua belas) tahun dan APS usia 13 (tiga belas)-15 (lima belas) tahun, masing-masing sebesar 98,97% (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh tujuh persen) dan 96,57% (sembilan puluh enam koma lima puluh tujuh persen).

Grafik 1.1: Perkembangan Partisipasi Sekolah berdasarkan Kelompok Usia dan Jenjang Pendidikan



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020-2024

Dalam hal pemenuhan layanan pendidikan bagi penduduk, Provinsi Kalimantan Utara masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan layanan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini. Persentase anak kelas 1 (satu) SD/ sederajat yang pernah mengikuti PAUD yang pada tahun 2024 baru mencapai 32,31% (tiga puluh dua koma tiga puluh satu persen). Sementara itu, untuk dapat menunjukkan seberapa jauh layanan pendidikan telah dicapai, dapat dilihat melalui Angka Partisipasi Sekolah (APK) jenjang SMA/ sederajat di Provinsi Kalimantan Utara mencapai tingkatan yang optimal, dengan capaian pada tahun 2024 adalah sebesar 95,36% (sembilan puluh lima koma tiga puluh enam persen). Indonesia melalui provinsi Kalimantan Utara terus berupaya untuk dapat memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan, namun demikian disparitas layanan masih terjadi, baik antarwilayah, antarkelompok ekonomi, anak dengan disabilitas, serta dengan melihat aspek gender

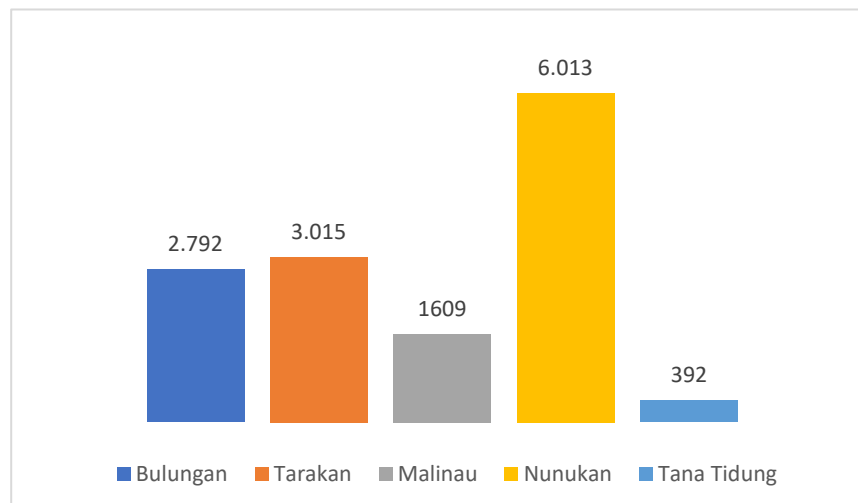
1.1.2 Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah

Selain disparitas partisipasi pendidikan antarwilayah, antarkelompok ekonomi, dan gender, masalah utama yang dihadapi bidang pendidikan di Indonesia adalah masih adanya anak usia sekolah yang tidak bersekolah (anak tidak sekolah/ATS). ATS mencakup anak yang tidak pernah mengikuti pendidikan pada jenjang apapun, putus sekolah tanpa menyelesaikan pendidikan pada

jenjang tertentu (SD/ sederajat, SMP/ sederajat, atau SMA/ sederajat), dan anak yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, minimal sampai pendidikan menengah.

Menurut Susenas BPS tahun 2024, terdapat 3,52 juta (tiga juta koma lima puluh dua) ATS pada kelompok usia 7 (tujuh)-18 (delapan belas) tahun. ATS terbanyak adalah pada kelompok usia 16 (enam belas)-18 (delapan belas) tahun, yaitu sebanyak 2,48 juta (dua juta koma empat puluh delapan) anak. Gambar 6 menunjukkan bahwa penurunan ATS belum dapat benar-benar dilakukan karena penurunan angkanya cukup lambat. Kasus ATS cenderung lebih tinggi pada kelompok anak usia pendidikan menengah, anak laki-laki, dan anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Grafik 1.2: Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025



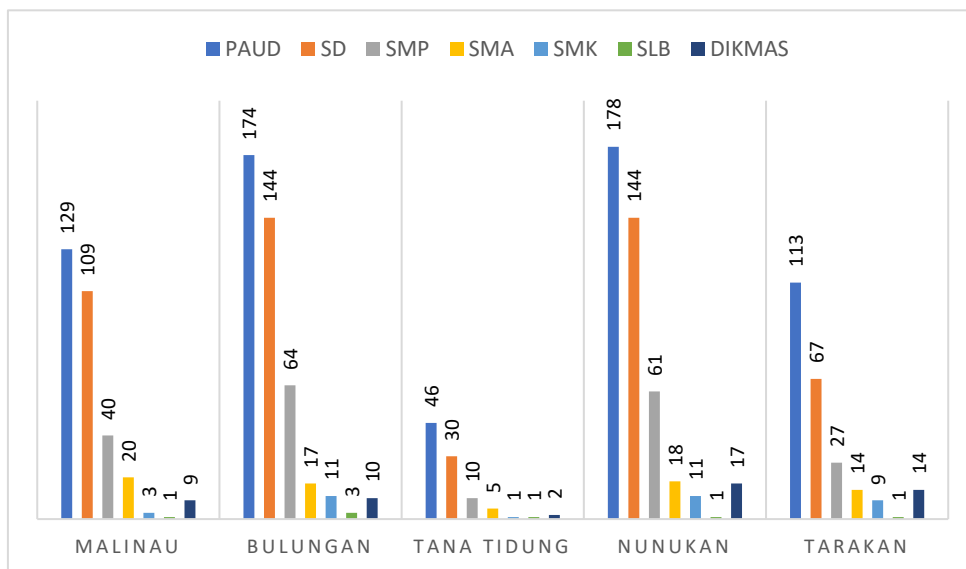
Sumber: Dasbor Verifikasi Validasi Anak Tidak Sekolah Tahun 2025

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Kalimantan Utara masih sangat banyak, terutama di Kabupaten Nunukan berjumlah 6.013 orang, Kota Tarakan sejumlah 3.015 orang kemudian diikuti oleh Malinau sejumlah 1.609 orang dan Bulungan sejumlah 2.792 orang kemudian Tana Tidung sejumlah 392 orang. Tiga penyebab utama mengapa jumlah anak tidak sekolah (ATS) begitu tinggi yaitu tidak ada biaya sekolah, bekerja/mencari nafkah, dan menikah. Jika melihat kondisi diatas, maka Provinsi Kalimantan Utara sangat membutuhkan intervensi khusus terkait penanganan anak tidak sekolah (ATS) mengingat wilayah kalimantan utara ini termasuk Wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) dan berbatasan langsung dengan negara Malaysia bagian Timur.

1.1.3 Akses Pendidikan

Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas 5 kabupaten/kota yakni Tarakan, Bulungan, Malinau, Tana Tidung, dan Nunukan. Sebaran satuan pendidikan berada pada wilayah dengan karakter geografis yang beragam, mulai dari perkotaan di pusat pemerintahan hingga daerah perbatasan dan pedalaman yang aksesibilitasnya terbatas. Kondisi ini berpengaruh pada pemerataan layanan dan mutu pendidikan. Secara umum, jumlah satuan pendidikan di Kalimantan Utara menunjukkan pertumbuhan seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan. Namun, kualitas sarana dan prasarana belum merata; banyak sekolah di daerah terluar masih mengalami keterbatasan ruang kelas, akses internet, tenaga pendidik, dan fasilitas pendukung pembelajaran yang memadai. Di sisi lain, sekolah-sekolah di kawasan perkotaan mulai bergerak menuju transformasi digital, implementasi kurikulum terbaru, dan penguatan kompetensi guru. Meski menghadapi tantangan, upaya revitalisasi satuan pendidikan melalui berbagai program pemerintah, seperti digitalisasi pembelajaran, penguatan guru, dan pengembangan sekolah penggerak, mulai menunjukkan arah positif. Pemda dan UPT pendidikan di wilayah Kalimantan Utara terus melakukan pendampingan, pemetaan mutu, serta advokasi kebijakan untuk mendorong peningkatan layanan pendidikan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

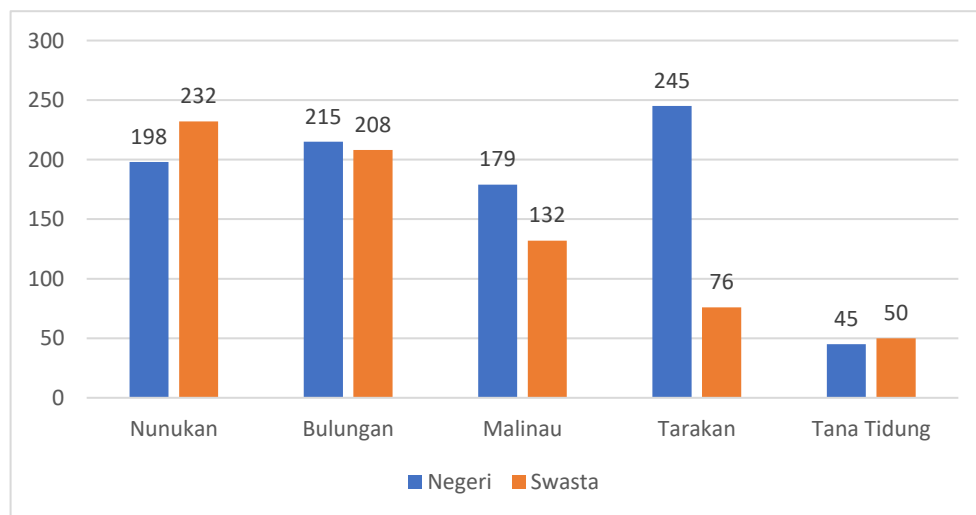
Grafik 1.3: Jumlah Satuan Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara



Sumber data : Dapodik Tahun 2025

Berdasarkan tayangan grafik 1.3 diatas, dapat dilihat bahwa Provinsi Kalimantan Utara memiliki komposisi jumlah terbesar yaitu satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 640 satuan pendidikan (42,55%), Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dengan 494 satuan pendidikan (32,84%). Komposisi satuan pendidikan formal jenjang Pendidikan Menengah (SMP, SMA, dan SMK) sebanyak 311 satuan pendidikan (20,67), jenjang kesetaraan (PKBM) sebanyak 52 (3,4%), dan jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB) sebanyak 7 satuan pendidikan (0,46%).

Grafik 1.4: Jumlah Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta di Provinsi Kalimantan Utara



Sumber: Dapodik Tahun 2025

Berdasarkan Grafik 1.4 diatas, dapat dilihat bahwa sebaran satuan pendidikan berdasarkan status negeri dan swasta memperlihatkan bahwa jumlah satuan pendidikan negeri lebih banyak dibandingkan satuan pendidikan swasta. Satuan Pendidikan Negeri dengan persentase sebesar 55,82%, sedangkan swasta sebesar 44,17% atau lebih banyak dari satuan pendidikan swasta. Dapat diartikan bahwa mutu pendidikan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara sangat diwarnai oleh mutu satuan pendidikan swasta. Maka sinergi BPMP Provinsi Kalimantan Utara dan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara harus terus dilakukan sebagai salah satu upaya pemerataan mutu layanan pendidikan di seluruh satuan pendidikan baik negeri maupun swasta.

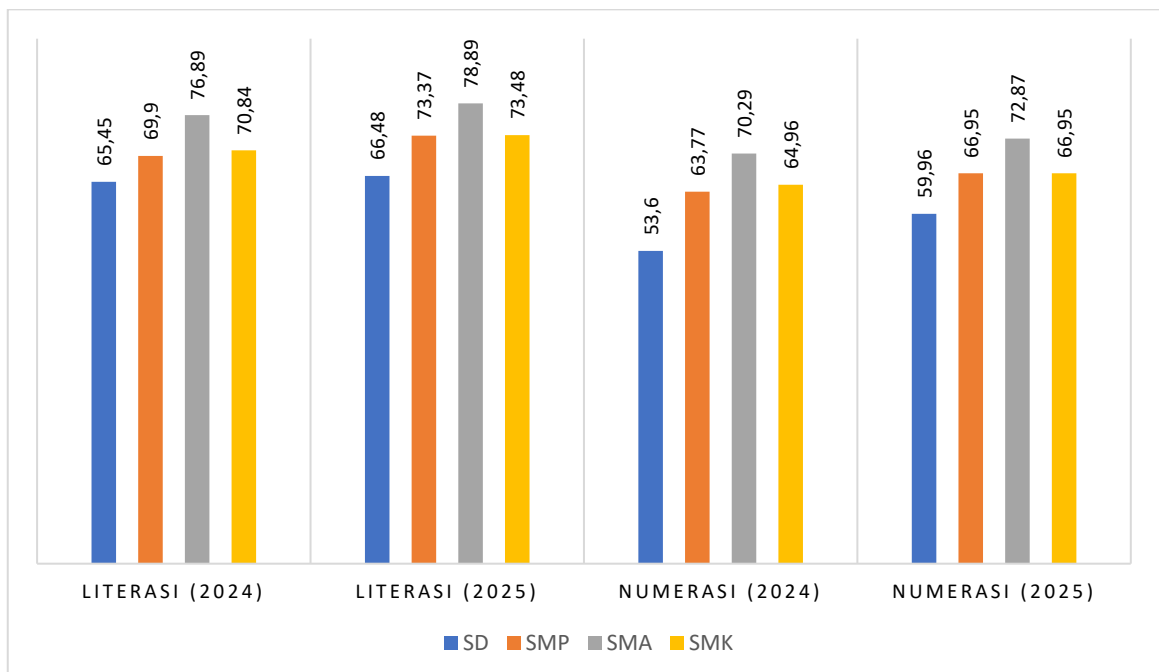
1.1.4 Kualitas Pendidikan

Kemampuan Literasi dan Numerasi

Pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dapat mewujudkan kemajuan negara. Peningkatan kualitas pendidikan di berbagai jenjang masih perlu diupayakan dengan peningkatan kualitas kurikulum, model pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sistem penilaian yang tepat, serta sarana dan prasarana pendukung pembelajaran yang memadai. Kualitas pendidikan juga perlu didukung dengan fasilitasi pembelajaran secara digital dengan memanfaatkan teknologi. Upaya yang dilakukan telah dapat mendorong perbaikan pembelajaran, yang antara lain ditunjukkan dengan peningkatan hasil belajar peserta didik (learning outcome).

Capaian pembelajaran yang diukur melalui Asesmen Nasional (AN), menunjukkan kecenderungan adanya perbaikan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Grafik 1.5 menunjukkan peningkatan proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi.

Grafik 1.5: Proporsi Peserta Didik yang Mencapai Nilai Kompetensi di Atas Batas Minimum dalam Asesmen Nasional



Sumber: Asesmen Nasional, 2023-2024

Peserta didik yang memiliki kompetensi dalam literasi dan numerasi terus mengalami peningkatan pada kurun waktu tahun 2023-2024. Proporsi peserta

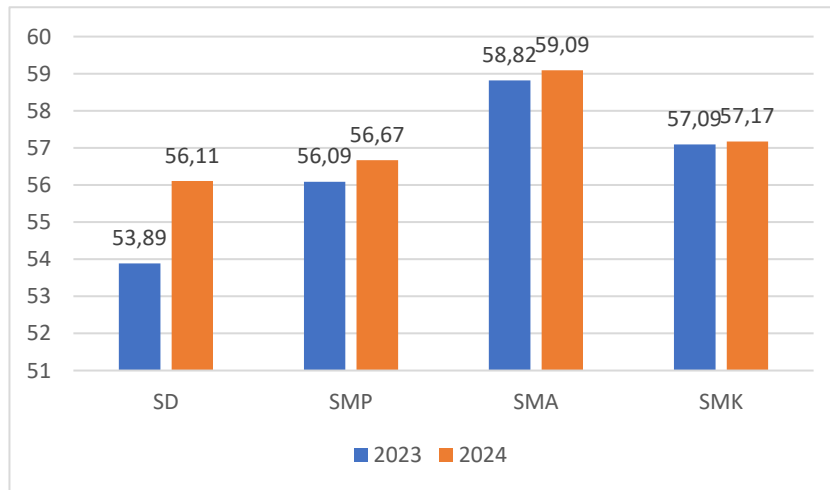
didik yang mencapai kompetensi nilai di atas batas minimum pada literasi membaca jenjang SD meningkat dari 65,45% pada tahun 2025 menjadi 66,48%, Jenjang SMP meningkat dari 69,9% pada tahun 2025 menjadi 73,37, jenjang SMA meningkat dari 76,89% pada tahun 2025 menjadi 78,89%, dan jenjang SMK meningkat dari 70,84% pada tahun 2025 menjadi 73,48. Peningkatan juga terjadi pada proporsi peserta didik yang mencapai kompetensi nilai di atas batas minimum pada numerasi jenjang SD dari 53,6% pada tahun 2025 menjadi 59,96%, jenjang SMP dari 63,77% pada tahun 66,95%, jenjang SMA dari 70,29 pada tahun 2025 menjadi 72,87%, dan jenjang SMK dari 64,96% pada tahun 2025 menjadi 66,95%.

Lingkungan Belajar

Lingkungan belajar aman merupakan lingkungan belajar yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak, pendidik, dan tenaga kependidikan, baik secara fisik, psikis (mental), maupun sosial. Keamanan bangunan, keamanan lingkungan, dan tersedianya fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) termasuk ke dalam keamanan fisik. Sedangkan, kebijakan anti kekerasan seksual, anti kekerasan fisik, anti perundungan, dan anti hukuman fisik termasuk ke dalam keamanan psikis. Dalam Rapor Lingkungan belajar aman merupakan lingkungan belajar yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak, pendidik, dan tenaga kependidikan, baik secara fisik, psikis (mental), maupun sosial. Keamanan bangunan, keamanan lingkungan, dan tersedianya fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) termasuk ke dalam keamanan fisik. Sedangkan, kebijakan anti kekerasan seksual, anti kekerasan fisik, anti perundungan, dan anti hukuman fisik termasuk ke dalam keamanan psikis.

Iklim Inklusivitas Sekolah adalah indikator yang dapat mengukur kondisi lingkungan sekolah yang menghargai perbedaan dan mampu memfasilitasi peserta didik disabilitas serta Cerdas Istimewa dan Berbakat Istimewa (CIBI). Indikator ini berguna untuk memastikan bahwa lingkungan sekolah merangkul perbedaan dan menyediakan fasilitas yang mengakomodasi berbagai disabilitas, kecerdasan, dan bakat. Hal ini didukung bahwa setiap peserta didik memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dan bakat sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Grafik 1.6: Hasil Capaian Iklim Inklusivitas Sekolah di Provinsi Kalimantan Utara

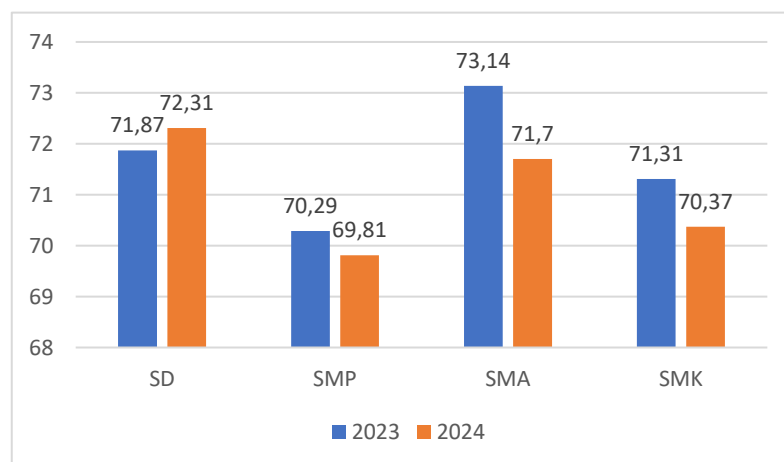


Sumber: Asesmen Nasional, 2023-2024

Berdasarkan data Asesmen Nasional, Iklim Inklusivitas Sekolah SD, SMP, dan SMA termasuk ke dalam kategori “Baik”, yang berarti bahwa sekolah sudah mampu memfasilitasi kebutuhan peserta didik dengan disabilitas dan cerdas istimewa berbakat istimewa (CIBI). Terlihat bahwa Iklim Inklusivitas Sekolah mengalami peningkatan pada seluruh jenjang di tahun 2024. Capaian tertinggi pada jenjang SMA sebesar 59,09 diikuti jenjang SMK sebesar 57,17 jenjang SMP dan SD masing-masing sebesar 56,67% dan 56,11%.

Iklm Keamanan Sekolah adalah indikator untuk mengukur tingkat rasa nyaman dan keamanan peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan di sekolah, termasuk di dalamnya terbebas dari perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktivitas narkoba di lingkungan satuan pendidikan.

Grafik 1.7: Hasil Capaian Iklim Keamanan Sekolah di Provinsi Kalimantan Utara

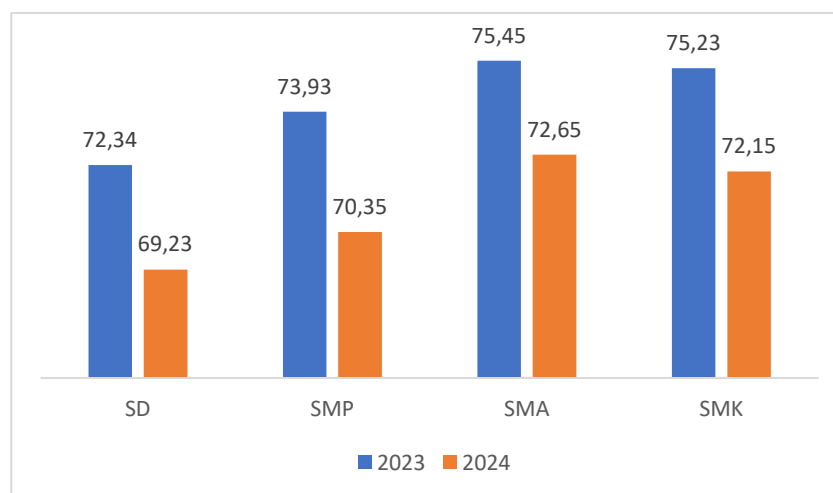


Sumber: Asesmen Nasional, 2023-2024

Berdasarkan data Asesmen Nasional, Iklim Keamanan Sekolah SD, SMP, dan SMA termasuk ke dalam kategori “Baik”, yang berarti bahwa Hal ini berarti pada seluruh jenjang sekolah sudah mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak, guru, dan tenaga kependidikan. Namun, terdapat penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2024, di jenjang pendidikan SMP mengalami penurunan dari 70,29% menjadi 69,81, jenjang SMA mengalami penurunan dari 73,14% menjadi 71,7%, dan jenjang SMK dari 71,31% menjadi 70,37%. Melihat kondisi diatas, maka pemerintah terus berupaya untuk memastikan peserta didik mendapatkan lingkungan keamanan sekolah yang baik.

Iklim Kebhinekaan Sekolah merupakan indikator yang mengukur kondisi lingkungan sekolah yang menunjukkan adanya toleransi dalam beragama, budaya, dan komitmen kebangsaan. Lingkungan sekolah yang toleran bisa mendorong peserta didik mengembangkan potensi dan bakat terbaik tanpa perlu khawatir mengalami diskriminasi akibat perbedaan agama, suku, ras dan budaya.

Grafik 1.8 Hasil Capaian Iklim Kebhinekaan Sekolah di Provinsi Kalimantan Utara



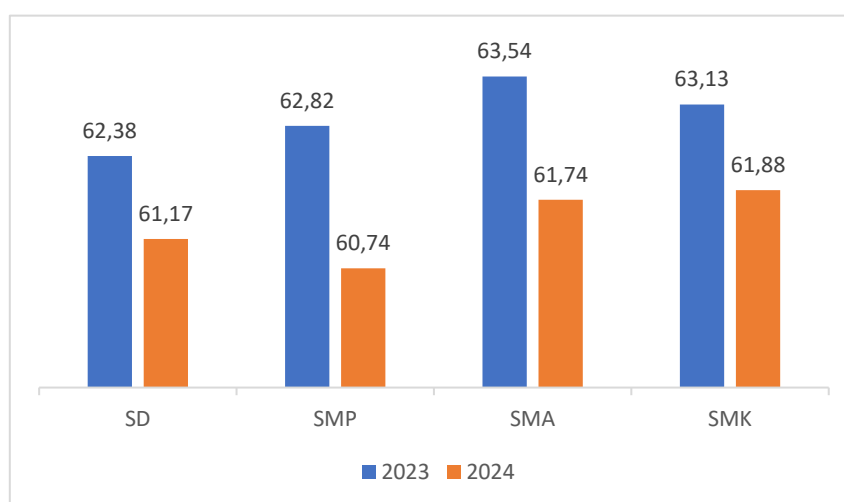
Sumber: Asesmen Nasional, 2023-2024

Berdasarkan data Asesmen Nasional, Iklim Kebhinekaan Sekolah jenjang SD, SMP, dan SMA termasuk ke dalam kategori “Baik”, yang berarti bahwa Hal ini berarti pada seluruh jenjang sekolah sudah mampu menciptakan lingkungan belajar dengan menuunjung tinggi toleransi dalam melihat perbedaan agama, suku, ras dan buday. Namun, terdapat penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2024, di jenjang pendidikan SD mengalami penurunan dari 73,34% menjadi 69,23%, SMP mengalami penurunan dari 73,93% menjadi 70,35%,

jenjang SMA mengalami penurunan dari 75,45% menjadi 72,65%, dan jenjang SMK dari 75,23% menjadi 72,15%.

Kualitas pembelajaran adalah kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Pembelajaran yang bersifat interaktif dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih baik untuk mendorong peserta didik mengembangkan karakter dan kompetensi yang diperlukan.

Grafik 1.9 Hasil Capaian Kualitas Pembelajaran Di Kalimantan Utara



Sumber: Asesmen Nasional, 2023-2024

Berdasarkan data Asesmen Nasional tahun 2024, Kualitas Pembelajaran jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK masih dalam kategori “Sedang”, yang berarti pembelajaran masih mengarah pada peningkatan kualitas yang ditunjukkan dengan suasana kelas yang mulai kondusif dan adanya dukungan afektif serta aktivasi kognitif dari guru. Pada tahun 2024, capaian kualitas pembelajaran tertinggi pada jenjang SMK sebesar 61,88 diikuti jenjang SMA sebesar 61,74 jenjang SD sebesar 61,17 dan jenjang SMP sebesar 60,74.

1.1.4 Capaian Kinerja BPMP Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 - 2024

Pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen di Provinsi Kalimantan Utara diukur berdasarkan Data Rapor Pendidikan Kab/Kota yang merupakan hasil Asesmen Nasional (AN) satuan pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara Selama periode tahun 2020 - 2024 hasil analisis Asesmen Nasional melalui data rapor pendidikan telah menunjukkan

kecenderungan adanya peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut :

Tabel 1.10: Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan Tahun 2020 – 2021

Sasaran Kegiatan (SK 1): Meningkatkan Penjaminan Mutu Pendidikan Di Seluruh Jenjang Pendidikan				
Indikator Kinerja Kegiatan	2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
IKK 1.1 Persentase satuan pendidikan yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75	26,5 %	31,23 %	27,4 %	30,91 %
IKK 1.2 Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	5 %	4,74 %	5 %	3,36 %
Persentase Kab/Kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	95 %	95,81 %	95,2 %	100 %

Sumber: Rapor Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 – 2021

Pada tabel 1.10 Mutu pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara pada periode target Renstra PMP Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 - 2021 menunjukkan data sebagai berikut :

Persentase satuan pendidikan yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75 dengan menggunakan pendekatan nilai rapor mutu sekolah dari Aplikasi PMP dengan cara menetapkan ambang batas nilai rata-rata SD, SMP, SMA dan SLB sebesar 75. Hasil capaian menunjukkan bahwa persentase rata-rata kinerja sekolah di Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2020 sebesar 31,23 % menurun pada Tahun 2021 menjadi 44,10%.

Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk menunjukkan peningkatan dengan asumsi semakin kecil persentase kesenjangan maka semakin baik mutu pendidikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2021 terjadi penurunan yaitu dari kesenjangan sebesar 4,74 % di Tahun 2020 kemudian menurun menjadi 3,36 % pada Tahun 2021. Persentase Kab/Kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan menunjukkan persentase jumlah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki rapor dapodik (data pokok pendidikan) yang akurat, terbarukan, dan berkelanjutan pada Tahun 2020 sebanyak 95,81% yang kemudian meningkat pada Tahun 2021 menjadi 100%.

Tabel 1.11: Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan Tahun 2022 – 2024

Sasaran Kegiatan (SK. 1): Meningkatkan Mutu Pendidikan Jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen						
Indikator Kinerja Kegiatan	2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
IKK 1.1 Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajaran	0,98	4,01	1,96	1,41	3,92	8,44
IKK 1.2 Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25	100	30	100	100 %	100 %

Sumber: Rapor Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2024

Pada tabel 1.11 Peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara pada periode target Renstra BPMP Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 - 2024 menunjukkan data sebagai berikut :

Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajaran dihitung berdasarkan persentase dari satuan pendidikan PAUD dan DIKMAS di Provinsi Kalimantan Utara yang meningkat nilai akreditasinya pada tahun sebelumnya dibandingkan dengan jumlah total satuan pendidikan PAUD dan Dikmas yang ada di Provinsi Kalimantan Utara Sumber data berdasarkan hasil akreditasi BAN PAUD menunjukkan bahwa persentase pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya pada periode akhir Renstra BPMP Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 meningkat menjadi 8,44 % dibandingkan tahun sebelumnya.

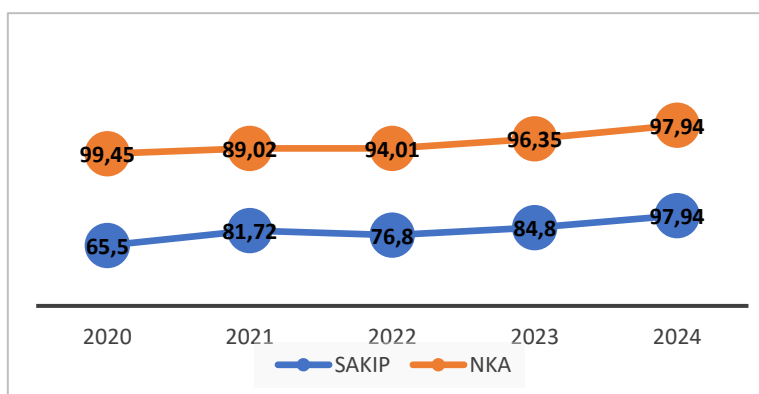
Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) menunjukkan bahwa Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 adalah sebesar 100%. Artinya, seluruh kabupaten/Kota yang ada di Provinsi, meningkat rapor pendidikannya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rapor pendidikan yang diterima pada

Tahun 2024, merupakan hasil Asesmen Nasional yang dilakukan pada Tahun 2023, sedangkan Rapor Pendidikan Tahun 2023 merupakan hasil Asesmen Nasional yang dilakukan pada Tahun 2022. Berdasarkan hasil asesmen nasional tersebut menunjukkan bahwa BPMP Provinsi Kalimantan Utara telah berupaya dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan

1.1.5 Tata Kelola BPMP Provinsi Kalimantan Utara

Tata kelola birokrasi yang profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif adalah komponen yang sangat penting untuk keberhasilan pembangunan nasional. BPMP Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen mendukung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator penilaian reformasi birokrasi melalui peningkatan pelaksanaan SAKIP dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. BPMP Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya dalam mewujudkan tata kelola yang baik melalui peningkatan nilai SAKIP dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) selama periode Renstra 2020 - 2024 sebagaimana berikut:

Grafik 1.12 Nilai SAKIP dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPMP Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 – 2024



Sumber: Laporan Kinerja BPMP Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Rata-rata capaian kinerja SAKIP dan NKA BPMP Provinsi Kalimantan Utara yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi meningkat setiap tahunnya dan sudah tergolong baik, seperti capaian predikat SAKIP meningkat dari B menjadi A, dan capaian Nilai Kinerja Anggaran yang selalu melebihi target selama 5 (lima) berturut-turut. BPMP Provinsi Kalimantan Utara masih memerlukan upaya untuk mendapatkan capaian yang lebih baik, dan berkomitmen untuk terus mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja SAKIP dan NKA sebagai bagian dari indikator kinerja Rencana Strategis 2025 - 2029.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi

Demi mendukung program Prioritas Nasional sektor pendidikan dasar dan menengah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Peta Jalan Pendidikan Indonesia (PJPI) Tahun 2025-2045, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkomitmen dan menunjukkan dukungan yang kuat terhadap peningkatan layanan dan kualitas pendidikan melalui program Prioritas Nasional sektor pendidikan dasar dan menengah yang ditetapkan sebagai Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029. BPMP Provinsi Kalimantan Utara merupakan Unit Pelaksana Teknis Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di 5 (lima) kabupaten/kota, meliputi Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan sehingga berpotensi dalam mengawal serta mendukung keterlaksanaan program prioritas tersebut di Provinsi Kalimantan Utara.

Penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan melalui berbagai kegiatan advokasi, sosialisasi, pendampingan, monitoring serta menjalin kemitraan dengan Pemda dan Sekolah Jenjang PAUD, SD, SMP, SMA di seluruh Kab/Kota Provinsi Kalimantan Utara. Berikut jumlah sekolah dan pendidik yang menjadi potensi dalam pelaksanaan program penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara:

Tabel 1.13: Data Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta di Provinsi Kalimantan Utara

Nama Kab/Kota	PAUD	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	Dikmas	Total
Malinau	130	110	42	22	3	1	11	308
Bulungan	181	149	72	25	11	3	22	441
Tana Tidung	43	31	11	5	1	1	3	92
Nunukan	180	159	69	27	11	1	25	447
Tarakan	118	78	35	21	9	1	21	262
Total Semua	652	527	229	100	35	7	82	1.632

Sumber data : Dapodik Tahun 2025

Tabel 1.14: Data Jumlah Pendidik Negeri dan Swasta di Provinsi Kalimantan Utara

Nama Kab/Kota	PAUD	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	Dikmas	Total
Malinau	533	1.497	782	448	116	23	28	3.427
Bulungan	718	1.635	750	442	319	40	47	3.951
Tana Tidung	215	448	237	136	24	16	18	1.094
Nunukan	742	2.007	940	501	331	24	138	4.683
Tarakan	643	1.701	870	458	416	47	116	4.251
Total Semua	2.851	7.288	3.579	1.985	1.206	150	347	17.406

Sumber data : Dapodik Tahun 2025

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu potensi penting dalam mendukung keterlaksanaan program prioritas dan program Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen di Provinsi Kalimantan Utara. Peningkatan kompetensi SDM secara berkesinambungan diperlukan agar SDM yang tersedia dapat memberikan layanan dan manfaat secara optimal kepada masyarakat. Komitmen dan upaya BPMP Provinsi Kalimantan Utara salah satunya adalah dengan cara melaksanakan program untuk peningkatan kompetensi pegawai seperti kegiatan In House Training (IHT), kegiatan Pengembangan Kapasitas Pegawai, dan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Spesifik Pegawai untuk seluruh pegawai ASN dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.15: Data Jumlah Pegawai BPMP Provinsi Kalimantan Utara

Jenis ASN	Jumlah
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	19 Orang
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	27 Orang
Total Semua	46 Orang

Sumber: Data Kepegawaian BPMP Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

Kepercayaan Para Pemangku Kepentingan

Kebijakan pemerintah pusat dan daerah berupa peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dari Kemendikdasmen menjadi landasan hukum bagi BPMP Provinsi Kalimantan Utara dan Satuan Pendidikan. Hal ini dapat mempercepat proses peningkatan mutu pendidikan di daerah. Kepercayaan para pemangku kepentingan ini terjalin melalui kerjasama dan kemitraan yang dilakukan BPMP Provinsi Kalimantan Utara dengan kabupaten/kota dalam percepatan dan optimalisasi program prioritas untuk perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Kemitraan yang telah dibangun antara BPMP Provinsi Kalimantan Utara telah meningkatkan dukungan dari pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menjalankan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) seperti Revitalisasi Sekolah, Makan Bergizi Gratis, Digitalisasi Pembelajaran dan Program Prioritas Nasional seperti Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Wajib Belajar 13 Tahun dan Penuntasan Anak Tidak Sekolah, Penguatan Karakter, Pembelajaran dan Penilaian demi menunjang penjaminan mutu pendidikan di daerah.

1.2.2 Permasalahan

Capaian kinerja pada indikator kinerja kegiatan meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen di Provinsi Kalimantan Utara selama selama 5 (ima) tahun berturut - turut perlahan menunjukkan kenaikan meskipun terdapat beberapa perubahan indikator capaian kinerja pada periode tersebut. Berdasarkan hasil rapor pendidikan Provinsi Kalimantan Utara periode Tahun 2020 - 2025 masih terdapat Kabupaten dan Kota yang menunjukkan capaian nilai literasi dan numerasi dibawah rata - rata nilai nasional, beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Gedung sekolah yang perlu perbaikan dan minimnya fasilitas seperti buku, alat peraga, sanitasi dan peralatan laboratorium.

- b. Kurangnya rumah dinas guru di daerah terpencil untuk menunjang pemerataan guru.
- c. Belum optimalnya keterampilan guru dan tenaga kependidikan dalam pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung pembelajaran dan pengelolaan pendidikan;
- d. Pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran masih terbatas dan belum merata;
- e. Belum optimalnya pelatihan berkelanjutan bagi kepala sekolah dan guru untuk meningkatkan profesionalisme, terutama dalam manajemen bantuan pendidikan.
- f. Kebutuhan akan pengadaan tenaga guru yang belum merata di setiap sekolah, terutama di daerah terpencil.
- g. Belum optimalnya pemahaman, kemampuan dan kesadaran satuan pendidikan dalam melakukan perencanaan kegiatan yang sesuai dengan rekomendasi rapor pendidikan;
- h. Belum optimalnya penanganan satuan pendidikan yang capaian literasi dan numerasinya di bawah standar minimum;
- i. Kualitas Mutu Pendidikan yang belum merata di setiap satuan pendidikan;
- j. Satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan dalam kondisi baik masih cukup rendah;
- k. Kualitas Pembelajaran jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK masih dalam kategori “Sedang”, yang berarti pembelajaran masih mengarah pada peningkatan kualitas yang ditunjukkan dengan suasana kelas yang mulai kondusif dan adanya dukungan afektif serta aktivasi kognitif dari guru
- l. Maraknya kasus kenakalan remaja, kekerasan seksual dan perundungan di satuan pendidikan;
- m. Masih diperlukan peningkatan layanan pendidikan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama pendidikan gizi, kesadaran dan pembiasaan murid dalam konsumsi pangan yang beragam, aman, dan sehat, higiene di satuan pendidikan seperti mencuci tangan sebelum makan, dan menjaga kebersihan lingkungan.
- n. Terdapat ketimpangan dalam literasi, numerasi, dan karakter peserta didik yang perlu ditingkatkan melalui inovasi pembelajaran dan peningkatan kapasitas pendidik berdasarkan hasil asesmen nasional;
- o. Tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS)

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi

Visi BPMP Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengemban amanat pembangunan sumber daya manusia melalui ikhtiar bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka visi BPMP Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewenangan dengan Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis (RAMAH), serta mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, BPMP Provinsi Kalimantan Utara di bawah binaan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta seluruh pemangku kepentingan terkait bekerja bersama untuk memajukan pendidikan sesuai dengan visi dan misi presiden.

Misi BPMP Provinsi Kalimantan Utara sejalan dengan tugas dan kewenangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam melaksanakan misi Presiden dengan penjabaran misi terkait peningkatan kualitas manusia Indonesia, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Sesuai dengan misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, maka misi BPMP Provinsi Kalimantan Utara adalah :

1. Mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, berdaya saing, dan relevan yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai, sistem pembelajaran berkualitas, serta teknologi pembelajaran.
2. Mengoptimalkan kerjasama, kolaborasi, dan peran seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan.

2.2 Tujuan dan Indikator Tujuan

Perumusan tujuan BPMP Provinsi Kalimantan Utara sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah mengacu kepada tujuan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Perumusan tujuan Kementerian ditujukan untuk menggambarkan ukuran terlaksananya visi - misi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan bidang tugas Kementerian. Adapun Tujuan dan Indikator Tujuan BPMP Provinsi Kalimantan Utara merupakan turunan dari Tujuan dan Indikator Tujuan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai berikut :

Tabel 2.1: Tujuan dan Indikator Tujuan BPMP Provinsi Kalimantan Utara

Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Indikator Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Indikator Tujuan Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen	Indikator Tujuan BPMP Provinsi Kalimantan Utara
Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB/ Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD 2. Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Kab/Kota dengan Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB /Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD di atas 75 2. Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun 3. Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun 4. Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/se derajat 5. Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal dan 	Mendukung Program Wajib Belajar 13 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah

Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Indikator Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Indikator Tujuan Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen	Indikator Tujuan BPMP Provinsi Kalimantan Utara
		<p>nonformal</p> <p>6. Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif</p>	
<p>Menguatnya mutu layanan pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD 2. Persentase peserta didik satuan pendidikan formal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: <ol style="list-style-type: none"> a. Literasi b. Numerasi 3. Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebhinekaan pada kategori 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase kabupaten/ kota yang memiliki PAUD dengan Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD pada kategori baik 2. Persentase satuan pendidikan yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum 3. Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran 2. Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan

Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Indikator Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Indikator Tujuan Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen	Indikator Tujuan BPMP Provinsi Kalimantan Utara
	baik	dan kompetensi esensial 4. Persentase satuan pendidikan yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	
Menguatnya sistem tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian	1. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 2. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	1. Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Kalimantan Utara dengan kategori sangat baik 2. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Kalimantan Utara minimal A

2.3 Sasaran Strategis

BPMP Provinsi Kalimantan Utara menetapkan sasaran yang mengacu kepada sasaran strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan yang akan dicapai tahun 2029, sebagai berikut:

Tabel 2.3: Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

No.	Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Sasaran Program Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen
1.	Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan	Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan untuk semua	Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah
2.	Menguatnya mutu layanan pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan	Meningkatnya kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter pada pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah
2.	Menguatnya sistem tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian

Tabel 2.4: Tujuan dan Sasaran Strategis BPMP Provinsi Kalimantan Utara

No.	Sasaran Strategis BPMP Provinsi Kalimantan Utara	Indikator Kinerja Kegiatan
1.	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen di Provinsi Kalimantan Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran 2. Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan
2.	Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Kalimantan Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Kalimantan Utara dengan kategori sangat baik 2. Predikat Akuntabilitas Kinerja

No.	Sasaran Strategis BPMP Provinsi Kalimantan Utara	Indikator Kinerja Kegiatan
		Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Kalimantan Utara minimal A

Berdasarkan Sasaran Strategis di atas, BPMP Provinsi Kalimantan Utara mengidentifikasi indikasi risiko yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Risiko-risiko tersebut dapat berindikasi pada ketercapaian Sasaran Strategis Kemendikdasmen. Adapun indikasi risikonya berdasarkan sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 2.5: Sasaran Strategis BPMP Provinsi Kalimantan Utara dan Indikasi Risiko

No.	Sasaran Strategis BPMP Provinsi Kalimantan Utara	Indikasi Risiko
1.	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen di Provinsi Kalimantan Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil asesmen pendidikan tidak dimanfaatkan untuk penguatan dan perbaikan inovasi pembelajaran dan pengajaran. 2. Pemerintah daerah tidak optimal dalam menyusun program dan anggaran kegiatan untuk penjaminan mutu pendidikan di wilayahnya.
2.	Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Kalimantan Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai kinerja anggaran tidak optimal karena kebijakan efisiensi anggaran (blokir anggaran) pada pelaksanaan DIPA sampai dengan akhir tahun. 2. Tidak bertambahnya jumlah SDM yang mengikuti Diklat SAKIP. 3. Satker tidak mendapatkan penghargaan selama tahun anggaran berjalan.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Arah kebijakan pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang sejalan dengan arah kebijakan dan strategi nasional yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 memuat 8 (delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah yang merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden dan Wakil Presiden, dengan penjabaran Prioritas Nasional sebagai berikut: 1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; 3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur; 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri; 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan; 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan Kemendikdasmen selaras dengan Prioritas Nasional butir 4 (empat) yaitu :

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Arah kebijakan dirumuskan secara sistematis melalui strategi yang kemudian diterjemahkan ke dalam program pembangunan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai berikut:

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
2. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
3. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas.
4. Penguatan sistem tata kelola pendidikan.
5. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja.

Tabel 3.1: Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam mendukung Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Prioritas Nasional 4

No.	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
	Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	
1.	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan untuk semua
2.	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan
3.	Penguatan sistem tata kelola pendidikan	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPMP Provinsi Kalimantan Utara

Arah kebijakan dan strategi BPMP Provinsi Kalimantan Utara merujuk pada arah kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam mendukung agenda pembangunan pada periode 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2: Sasaran Strategis BPMP Provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

No.	Sasaran Strategis Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen	Sasaran Program BPMP Provinsi Kalimantan Utara
1.	Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	Mendukung Program Wajib Belajar 13 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah

No.	Sasaran Strategis Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen	Sasaran Program BPMP Provinsi Kalimantan Utara
	Meningkatnya kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter pada pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen di Provinsi Kalimantan Utara
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian	Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Kalimantan Utara

Arah kebijakan dan strategi yang disusun oleh Kemendikdasmen juga mendukung program visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden serta keberlanjutan program Prioritas Nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selaras dengan BPMP Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3: Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

No.	Arah Kebijakan Kemendikdasmen	Strategi Kemendikdasmen
1.	Penguatan mutu layanan, dan kualitas pembelajaran dan pengajaran, kurikulum dan model pembelajaran, serta penilaian pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah, dengan pemanfaatan Rapor Pendidikan, penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi satuan pendidikan. 2. Penguatan dan penerapan Standar Nasional Pendidikan.
2.	Penguatan tata kelola serta akuntabilitas Kementerian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan yang RAMAH (Responsif, Adaptif, Melayani, Akuntabel, dan Harmonis) dan SANTUN (Setia, Amanah, Negarawan, Teladan, Unggul, dan Ngemong). 2. Memastikan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pendidikan yang transparan di tingkat pusat dan daerah. 3. Melanjutkan reformasi struktural Kementerian untuk

No.	Arah Kebijakan Kemendikdasmen	Strategi Kemendikdasmen
		meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja unit kerja.

Tabel di atas menjadi pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi BPMP Provinsi Kalimantan Utara yang akan dilaksanakan melalui sinergi antara BPMP Provinsi Kalimantan Utara sebagai unit pelaksana teknis dengan instansi terkait serta pemerintah daerah dan satuan pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara Prinsip mendasar yang menjadi pedoman arah kebijakan BPMP Provinsi Kalimantan Utara adalah mendukung arah kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

Arah kebijakan, strategi, dan program Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara yang mendukung strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai berikut:

1. Peningkatan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen di Provinsi Kalimantan Utara

Kondisi yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Satuan pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara memenuhi SPM pendidikan

Strategi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara untuk mencapai kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

- Pembinaan Pembelajaran dan Penilaian untuk meningkatkan pemahaman satuan pendidikan penerima Bantuan Operasional Sekolah Kinerja (BOS Kinerja) terhadap pendekatan dan inovasi dalam pembelajaran dan penilaian, serta meningkatkan pemahaman dan dukungan pemerintah daerah terhadap kebijakan, program, dan praktik pembelajaran serta penilaian, khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran mendalam (Deep Learning), Coding, dan Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence/AI).
- Pembinaan Transfer Daerah untuk mengawal dan mendampingi pelaksanaan program - program pusat di satuan pendidikan dan pemda terkait.

- Pembinaan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk membantu daerah dalam menyusun perencanaan yang komprehensif dan melaksanakan program-program peningkatan mutu pendidikan berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta melaksanakan supervisi Implementasi Sistem (PMP) dan edukasi penggunaan SNP di Satuan Pendidikan.
 - Pembinaan Kemitraan untuk membangun komitmen dan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program pusat di daerah
 - Pembinaan Digitalisasi Sekolah untuk mendampingi serta mengadvokasi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam pemanfaatan rumah pendidikan, pengembangan konten pembelajaran dalam mendukung program digitalisasi pembelajaran, serta memastikan pemanfaatan bantuan digitalisasi dilakukan secara tepat.
 - Pembinaan Penguatan Pendidikan Karakter untuk mendampingi serta mengadvokasi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam program Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan pemantauan pelaksanaan program MBG di daerah.
2. Tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
- Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah sebagai berikut :
- a. Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Kalimantan Utara dengan kategori sangat baik
 - b. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Kalimantan Utara minimal A

Strategi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Utara untuk mencapai kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

- Memperkuat mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada monitoring pelaksanaan dan evaluasi dampak program;
- Memperkuat kerja sama dan sinkronisasi kebijakan pendidikan dengan pemerintah daerah;
- Penguatan sistem pengawasan internal untuk meningkatkan kepatuhan dan integritas terhadap peraturan perundang-undangan;
- Mengembangkan mekanisme pengelolaan sumber daya manusia BPMP Provinsi Kalimantan Utara yang berbasis mekanisme manajemen talenta;

- Melakukan inovasi – inovasi dalam meningkatkan layanan internal dan eksternal BPMP Provinsi Kalimantan Utara

3.4 Kerangka Regulasi

BPMP Provinsi Kalimantan Utara dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian sasaran strategis kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berpijak pada kerangka regulasi yang relevan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi BPMP Provinsi Kalimantan Utara Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemendikdasmen sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, diperlukan dukungan kerangka kelembagaan yang mencakup struktur organisasi, tata kelola, dan manajemen aparatur sipil negara yang efektif dan efisien. Hal ini bertujuan agar BPMP Provinsi Kalimantan

Utara Kemendikdasmen dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal. Kerangka kelembagaan ini diharapkan dapat memastikan penataan organisasi yang selaras dengan pencapaian sasaran strategis, serta meningkatkan efektivitas kelembagaan melalui struktur organisasi yang tepat, proses organisasi yang efisien, dan pencegahan terjadinya duplikasi tugas dan fungsi.

Tugas dan Fungsi BPMP Provinsi Kalimantan Utara

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11 tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

Tugas

Melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di provinsi.

Fungsi

1. Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
2. Pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
3. Pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
4. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
5. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat; dan
7. Pelaksanaan urusan administrasi.

3.4.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi di BPMP Provinsi Kalimantan Utara mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BBPMP dan BPMP.

Gambar 3.4: Struktur Organisasi BPMP Provinsi Kalimantan Utara



Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan, evaluasi, dan penyusunan laporan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing - masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.4.2 Pengelolaan Aparatur Sipil Negara

Kebijakan pengelolaan aparatur sipil negara dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki integritas, profesional, dan kompeten berdasarkan sistem merit sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Tabel 3.5: Rekapitulasi Jumlah Aparatur Sipil Negara BPMP Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

No.	Jenis ASN	Jumlah
1.	PNS:	
	Kepala	1
	Kasubbag Umum	1
	Jabatan Fungsional	3
	Jabatan Pelaksana	14
2.	PPPK:	
	Jabatan Fungsional	3
	Jabatan Pelaksana	24
Total		46 orang

3.4.3 Proyeksi Kebutuhan SDM BPMP Provinsi Kalimantan Utara

Kebutuhan ASN tahun 2025-2029 didasarkan pada kebutuhan organisasi sesuai hasil analisis beban kerja di masing-masing unit kerja dalam rangka pencapaian tujuan BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Di samping itu, proyeksi kebutuhan SDM juga mempertimbangkan jumlah pegawai yang pensiun dari tahun ke tahun, dengan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi kerja di masing-masing unit kerja. Tabel 3.6 menggambarkan proyeksi kebutuhan SDM BPMP Provinsi Kalimantan Utara sampai tahun 2029.

Tabel 3.6 Proyeksi Kebutuhan SDM BPMP Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029

No.	Unit Kerja	Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	BPMP Provinsi Kalimantan Utara	46	46	51	63	75

3.4.4 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi internal BPMP Provinsi Kalimantan Utara merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak

netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen ASN tidak transparan, belum ada perubahan paradigma (mindset), KKN yang masih terjadi di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima (mudah, murah, cepat, dan lebih baik) belum sepenuhnya terbangun secara luas.

Sebagai unit kerja yang mengemban amanat dalam membangun SDM melalui peningkatan mutu pendidikan dan pemajuan kebudayaan dengan memperhitungkan capaian kinerja, potensi, dan permasalahan, BPMP Provinsi Kalimantan Utara berupaya mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter. Untuk itu, Program Reformasi Birokrasi Tahun 2025-2029 diharapkan dapat mencapai SDM yang berkualitas, baik dari aspek jumlah, kompetensi (hard competencies dan soft competencies), maupun integritas; termasuk pula manajemen serta kinerja SDM yang tinggi. Sumber Daya Manusia aparatur merupakan elemen terpenting bagi instansi pemerintah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan. Mengingat begitu pentingnya SDM aparatur, maka manajemen SDM diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana dan terpola agar tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu pula dalam reformasi birokrasi, aspek SDM aparatur menjadi aspek penting, sehingga perlu dilakukan penataan secara sistematis. Di samping aspek SDM aparatur, ketercapaian peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan BPMP Provinsi Kalimantan Utara juga merupakan hal yang sangat penting.

BPMP Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu unit pelayanan teknis di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Kemendikdasmen, terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik, meliputi delapan area perubahan, yakni:

Tabel 3.7: 8 (Delapan) Area Perubahan

No.	Area Perubahan	Indikator	Program Kegiatan
1.	Manajemen Perubahan	Indeks Kepemimpinan Perubahan	a. Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan

No.	Area Perubahan	Indikator	Program Kegiatan
			implementasi perubahan (<i>reform</i>) b. Pembentukan tim kerja RBI di lingkungan BPMP Provinsi Kalimantan Utara c. Penguatan nilai integritas, perubahan pola pikir dan budaya kinerja d. Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan <i>role model</i> dengan dibentuknya tim agen perubahan di lingkungan BPMP Provinsi Kalimantan Utara e. Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0
2.	Penguatan Pengawasan	Maturitas SPIP	a. Pembentukan tim SPI dan SPIP di lingkungan BPMP Provinsi Kalimantan Utara b. Penyusunan rencana kerja SPI dan SPIP c. Penguatan Sistem Manajemen Konflik
3.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	a. Perencanaan terintegrasi dan lintas sektor (<i>collaborative</i>) b. Implementasi manajemen kinerja berorientasi hasil
4.	Penguatan Kelembagaan	Indeks Kelembagaan	a. <i>Assessment</i> organisasi berbasis kinerja b. Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan berdasarkan hasil evaluasi

No.	Area Perubahan	Indikator	Program Kegiatan
5.	Penguatan Tata Laksana	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan b. Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital)
6.	Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Indeks Profesionalitas ASN 2. Indeks Merit System 3. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi b. Pengembangan Pegawai berbasis Kompetensi c. Assessment Pegawai d. Penanaman nilai integritas melalui penghargaan pegawai dengan kinerja terbaik e. Analisis Kebutuhan Pelatihan Pegawai f. Pemetaan Kompetensi Pegawai sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)
7.	Penguatan Peraturan Perundang-Undangan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Indeks Reformasi Hukum 2. Indeks Kualitas Kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi (menghilangkan <i>overlapping</i> peraturan) b. Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi; c. Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan d. Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> 1. Indeks Inovasi 2. Indeks Pelayanan Publik 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan dokumen standar pelayanan b. Penyusunan alur layanan publik c. Mengembangkan budaya pelayanan prima d. Penguatan kompetensi petugas pelayanan publik

No.	Area Perubahan	Indikator	Program Kegiatan
			e. Penilaian terhadap pelayanan melalui survey dan analisis kepuasan pelanggan

Sumber: Draft Roadmap RBI Kemdikbudristek 2020-2024

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPMP Provinsi Kalimantan Utara Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemendikdasmen serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, BPMP Provinsi Kalimantan Utara menetapkan Sasaran Strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari kondisi yang dimaksud, setiap Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Tabel 4.1: Sasaran Strategis, Indikator, dan Target BPMP Provinsi Kalimantan Utara

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SS	Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan untuk semua						
IKSS	Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD (RPJMN-PP)	%	64,39	64,60	64,79	64,96	65,13
IKSS	Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun	%	92,44	92,50	92,57	92,64	92,71
SS	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan						
IKSS	Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD	%	64,78	65,58	66,38	67,18	67,98
IKSS	Persentase peserta didik satuan pendidikan formal dan nonformal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (RPJMN-KP)						
	a. Literasi Membaca		68,62	70,62	72,62	74,62	76,62
	b. Numerasi		67,35	69,35	71,35	73,35	75,35

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
IKSS	Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik (RPJMN-PP)	%	33,24	33,45	33,66	33,87	34,08
SS	Meningkatnya tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel						
IKSS	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian		89,35	90	90,1	90,2	90,3

Tabel 4.2: Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Target Kinerja BPMP Provinsi Kalimantan Utara

Kode	Uraian	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK.1	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen						
IKK 1.1	Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran	Persen	64,06	65,34	66,64	67,98	69,34
IKK 1.2	Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan	Persen	57,61	67,75	72,64	77,72	82,61
SK.2	Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Kalimantan Utara						
IKK 2.1	Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Kalimantan Utara dengan kategori sangat baik	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
IKK 2.1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Kalimantan Utara minimal A	Predikat	A	A	A	A	A

Untuk mencapai target kinerja, program dan kegiatan yang disusun dalam mendukung capaian Rencana Strategis BPMP Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut :

Tabel 4.2: Program dan Kegiatan BPMP Provinsi Kalimantan Utara

Kegiatan	RO/Komponen
<p>Dukungan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Revitalisasi Sekolah ● Digitalisasi Pembelajaran ● Makan Bergizi Gratis <p>Dukungan Program Prioritas Nasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Wajib Belajar 13 Tahun 0064an Penuntasan Anak Tidak Sekolah (ATS) ● Penguatan Karakter ● Pembelajaran dan Penilaian ● Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ● Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) 	<p>RO.750.Satuan PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 091-Pelaksanaan Pembinaan Pembelajaran dan Penilaian ● 092-Pelaksanaan Pembinaan Transfer Daerah ● 093-Pelaksanaan Pembinaan Penjaminan Mutu Pendidikan ● 094-Pelaksanaan Pembinaan Kemitraan ● 096-Pembinaan Penguatan Pendidikan Karakter ● 097-Pelaksanaan Pembinaan Digitalisasi Sekolah
<p>Non Program Prioritas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan Kualitas Transfer daerah ● Peningkatan Kualitas Dapodik ● Tanggap Darurat Bencana 	<p>RO.750. Satuan PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 092-Pelaksanaan Pembinaan Transfer Daerah ● 094-Pelaksanaan Pembinaan Kemitraan
<p>Pencapaian Target RPJMN/Renstra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pendampingan Perencanaan SPM Pendidikan ● Pendampingan Penganggaran SPM Pendidikan ● Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM Pendidikan 	<p>RO.751. Pemda yang Mendapatkan Pendampingan Penerapan SPM Pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 091-Pendampingan Perencanaan SPM Pendidikan ● 092-Pendampingan Penganggaran SPM Pendidikan ● 093-Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM Pendidikan
<p>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Kalimantan Utara ● Predikat Akuntabilitas Kinerja 	<p>KRO - Layanan Dukungan Manajemen Internal:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● RO. EBA.956 Layanan BMN ● RO. EBA.962 Layanan Umum ● RO. EBA.994 Layanan Perkantoran

Tujuan Program/Kegiatan

1. Terlaksananya pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah;
2. Terlaksananya pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah;
3. Terlaksananya supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
4. Terlaksananya fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
5. Terlaksananya pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah;
6. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah; dan
7. Terlaksananya urusan administrasi BPMP Provinsi Kalimantan Utara.

Indikasi Highlight Intervensi

BPMP Provinsi Kalimantan Utara mengawal dan mendukung pelaksanaan Program Prioritas Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen :

1. Terlaksananya Program Revitalisasi Sekolah di Provinsi Kalimantan Utara
2. Terlaksananya Program Digitalisasi Pembelajaran di Provinsi Kalimantan Utara
3. Terlaksananya Program Sistem Penerimaan Murid Baru di Provinsi Kalimantan Utara
4. Terlaksananya Program Wajib Belajar 13 Tahun di Provinsi Kalimantan Utara
5. Terlaksananya Program Penguatan Pendidikan Karakter di Provinsi Kalimantan Utara
6. Terlaksananya Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Kalimantan Utara
7. Terlaksananya Program Pembelajaran dan Penilaian di Provinsi Kalimantan Utara
8. Terlaksananya Program Program Penjaminan Mutu Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara

Indikator dan Rincian Output

Tabel 4.4 Indikator dan Rincian Output

IKP/IKK/RO	Nomenklatur
SK 1	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan

	Dikmen
IKK 1.1	Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran
RO 750	Satuan PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya
IKK 1.2	Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan
RO 751	Pemda yang Mendapatkan Pendampingan Penerapan SPM Pendidikan
SK 2	Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Kalimantan Utara
IKK 2.1	Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Kalimantan Utara dengan kategori sangat baik
IKK 2.2	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Kalimantan Utara minimal A
RO 956	Layanan BMN
RO 962	Layanan Umum
RO 994	Layanan Perkantoran

Lokasi

- Satuan Pendidikan Jenjang SD, SMP, dan SMA di Provinsi Kalimantan Utara
- Pemda/Dinas Pendidikan Kab/Kota Provinsi Kalimantan Utara

Bagian/Tim Kerja Pelaksana

Seluruh tenaga struktural, tenaga fungsional, dan staf PPPK di BPMP Provinsi Kalimantan Utara :

- Sub Bagian Umum
- Tim Kerja Jenjang PAUD dan Kesetaraan
- Tim Kerja Jenjang Sekolah Dasar (SD)
- Tim Kerja Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- Tim Kerja Jenjang Sekolah Menengah Awal (SMA)
- Tim Kerja Program Prioritas Nasional dan PHTC

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka diperlukan dukungan sumber daya, prasarana yang memadai, regulasi yang mendukung, serta pendanaan yang mencukupi. Indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPMP Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5: Indikasi Kebutuhan Pendanaan BPMP Provinsi Kalimantan Utara 2025 - 2029

Program/ Kegiatan	Indikasi Pendanaan (Rp juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	3.961	7.950	7.950	8.150	8.200
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	6.038	7.875	7.890	7.950	8.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis BPMP Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 - 2029 memuat visi, misi, kebijakan, tujuan strategis, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan (IKK) penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025 - 2029.

Dalam Rencana Strategis diuraikan secara sistematis tujuan strategis, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan penjaminan mutu pendidikan yang semuanya bermuara pada pencapaian visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai amanat yang harus diemban oleh BPMP Provinsi Kalimantan Utara selama kurun waktu 2025 - 2029. Secara operasional kegiatan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri dari klasifikasi rincian output (1) Satuan PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya; (2) Pemda yang Mendapatkan Pendampingan Penerapan SPM Pendidikan; (3) Layanan BMN; (4) Layanan Umum; (5) Layanan Perkantoran .

Dengan adanya renstra ini, seluruh kegiatan BPMP Provinsi Kalimantan Utara diharapkan dapat terarah dan terencana dalam mencapai sasaran - sasaran yang telah ditetapkan pada indikator kinerja baik dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun aspek realisasi anggaran. Selain itu diharapkan terjadi peningkatan kualitas layanan penjaminan mutu pendidikan, tata kelola dan efektivitas birokrasi serta pelibatan publik yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.

Rencana Strategis BPMP Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 - 2029 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan arah pelaksanaan pengelolaan kegiatan serta untuk memastikan bahwa arah kebijakan pengelolaan BPMP Provinsi Kalimantan Utara selaras dengan arah kebijakan dan pengelolaan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Lampiran: Matriks Kinerja dan Pendanaan

Keterangan	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
DIREKTORAT JENDERAL PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN										23.239.435	40.153.496	58.718.844	60.480.409	62.294.821
SS	SS 1	Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan untuk semua												
IKSS	IKSS 1.1	Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD		persen	64,39	64,60	64,79	64,96	65,13					
IKSS	IKSS 1.2	Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun		persen	92,44	92,5	92,57	92,64	92,71					
SS	SS 2	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan												
IKSS	IKSS 2.1	Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD		nilai	64,78	65,58	66,38	67,18	67,98					
IKSS	IKSS 2.2	Persentase peserta didik satuan pendidikan formal dan nonformal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional:												
IKSS	IKSS 2.2	a. Literasi Membaca		persen	68,62	70,62	72,62	74,62	76,62					
IKSS	IKSS 2.2	b. Numerasi		persen	67,35	69,35	71,35	73,35	75,35					
IKSS	IKSS 2.3	Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik		persen	33,24	33,45	33,66	33,87	34,08					

Keterangan	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
SS	SS 5	Meningkatnya tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel												
IKSS	IKSS 5.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian		Indeks	89,35	90	90,1	90,2	90,3					
Program	DF	Program Wajib Belajar 13 Tahun								13.639.360	37.011.025	55.482.097	57.146.560	58.860.957
SP	SP	Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah												
IKP	IKP 1.1.1	Persentase Kab/Kota dengan Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD di atas 75		persen	70,83	73,12	75,41	77,7	80					
IKP	IKP 1.2.4	Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun		persen	99,21	99,22	99,24	99,25	99,27					
IKP	IKP 1.2.5	Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun		persen	96,2	96,25	96,3	96,35	96,39					
IKP	IKP 1.2.6	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/ sederajat		persen	87,4	87,76	88,08	88,36	88,63					
IKP	IKP 1.2.7	Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal dan nonformal		anak	496810	993620	1720430	2217240	2714050					
IKP	IKP 1.2.8	Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif		persen	31,14	35,6	40,07	44,53	49					
Kegiatan	7595	Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	Pusat							5.093.691	10.583.936	9.763.540	10.056.446	10.358.140
SK	SK	Terwujudnya layanan pendidikan SMP yang merata dan berkualitas												
IKK	IKK	Jumlah kab/kota yang menerapkan program afirmasi pada jenjang SMP		Lemba-ga	514	514	514	514	514					

Keterangan	Progr -am/ Kegia -tan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RO	7596. QDC. 294	Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di jenjang SD		Orang	37403	76884	118442	162078	207793					
KRO	7595. RBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah												
RO	7596. RBI.2 91	SD yang Direvitalisasi		Unit	4053	4256	4469	4692	4927					
Kegiatan	7597	Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pusat							654.750	5.636.972	14.268.918	14.696.985	15.137.895
SK	SK	Terwujudnya layanan PAUD yang merata dan berkualitas												
IKK	IKK	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD		persen	36,61	36,74	36,86	36,99	37,11					
IKK	IKK	Persentase satuan PAUD yang memenuhi SNP sarpras		persen	5,63	6,26	6,89	7,52	8,15					
KRO	7597. QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga												
RO	7597. QDB. 103	Kab/Kota yang mendapatkan dukungan pelaksanaan program afirmasi pada jenjang PAUD		Lemba- ga	514	514	514	514	514					
KRO	7597. RBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah												
RO	7597. RBI.1 91	Satuan PAUD yang Direvitalisasi		Unit	1241	1188	1135	1082	1029					
RO	7597. RBI.1 92	Unit Sekolah Baru Satuan PAUD yang Dibangun		Unit	2	3	4	5	6					
Kegiatan	7599	Pembinaan Sekolah Menengah Atas	Pusat							2.983.522	5.750.808	3.726.692	3.838.493	3.953.647
SK	SK	Terwujudnya layanan pendidikan SMA yang merata dan berkualitas												
IKK	IKK	Jumlah provinsi/kab/kota yang menerapkan program afirmasi pada jenjang SMA		Lemba- ga	74	74	74	74	74					
IKK	IKK	Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di jenjang SMA		Orang	58800	117600	176400	235400	294000					
IKK	IKK	Persentase SMA yang memenuhi SNP sarpras		persen	40,06	49,48	58,89	68,3	77,71					

Keterangan	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
KRO	7599.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga												
RO	7599.QDB.405	Prov/Kab/Kota yang mendapatkan dukungan pelaksanaan program afirmasi pada jenjang SMA		Lembaga	74	74	74	74	74					
KRO	7599.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat												
RO	7599.QDC.494	Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di jenjang SMA		Orang	58800	117600	176400	235400	294000					
KRO	7599.RBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah												
RO	7599.RBI.491	SMA yang Direvitalisasi		Unit	1362	1000	1000	1000	1000					
RO	7599.RBI.492	Unit Sekolah Baru SMA yang Dibangun		Unit	20	20	20	20	16					
Program	DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran								8.585.695	1.734.255	1.786.284	1.839.872	1.895.068
SP	SP	Meningkatnya kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter pada pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan												
IKP	IKP 2.1.1	Persentase kabupaten/kota yang memiliki PAUD dengan Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD pada kategori baik		persen	19,84	24,71	29,57	34,44	39,30					
IKP	IKP 2.2.10	Persentase satuan pendidikan yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum		persen	44,59	45,59	46,59	47,59	48,59					
IKP	IKP 2.2.11	Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial		persen	87,96	91,98	96	100	100					

Keterangan	Progr -am/ Kegia -tan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
IKP	IKP 2.2.1 4	Persentase perangkat kurikulum dan pembelajaran yang kontekstual, berpusat pada peserta didik dan fokus pada karakter serta kompetensi esensial		persen	88	88	89	89	90					
IKP	IKP 2.3.1	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan layanan penguatan pendidikan karakter yang bermutu		persen	8,3	21,7	38,3	53,3	63,3					
IKP	IKP 2.3.2	Persentase satuan pendidikan yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik		persen	66,02	67,83	70,80	72,16	73,69					
Kegiatan	7600	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Pusat							2.055.838	244.479	251.814	259.368	267.149
SK	SK	Meningkatnya perkembangan dan pembelajaran PAUD yang berkualitas												
IKK	IKK	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan PAUD-HI		persen	64,79	79,38	93,97	100	100					
IKK	IKK	Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar		persen	36,3	54,46	72,61	90,76	100					
IKK	IKK	Persentase satuan PAUD yang memiliki nilai kualitas lingkungan belajar PAUD pada kategori baik		persen	21,57	22,37	23,17	23,97	24,77					
IKK	IKK	Persentase satuan PAUD yang menerapkan kurikulum yang berlaku		persen	79,05	86,04	93,02	100	100					
KRO	7600. QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga												
RO	7600. QDB. 138	Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan implementasi Kurikulum dan Model Pembelajaran yang berlaku jenjang PAUD		Lembaga	514	514	514	514	514					

Keterangan	Progr -am/ Kegia -tan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RO	7600. QDB. 143	Satuan PAUD Menyelenggarakan Pendekatan Holistik Integratif		Lembag a	5000	5000	5000	5000	5000					
RO	7600. QDB. 145	Kab/Kota yang melaksanakan program UKS pada jenjang PAUD		Lembag a	514	514	514	514	514					
RO	7600. QDB. 180	Kab/kota yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu pada jenjang PAUD		Lembag a	514	514	514	514	514					
RO	7600. QDB. 181	Satuan PAUD yang Mendapatkan Pendampingan Digitalisasi Pembelajaran		Lembag a		6419	6419	6419	6419					
KRO	7600. RAA	Sarana Bidang Pendidikan												
RO	7600. RAA.1 93	Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran		Unit	64191									
Kegiatan	7601	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Dasar	Pusat							4.414.729	419.869	432.465	445.439	458.802
SK	SK	Meningkatnya pembelajaran Sekolah Dasar yang berkualitas												
IKK	IKK	Persentase SD yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum		persen	48,77	50,97	53,27	55,67	58,17					
IKK	IKK	Persentase SD yang menerapkan kurikulum yang berlaku		persen	98,09 5	98,73	99,365	100	100					
IKK	IKK	Persentase SD yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik		persen	73,2	74,8	76,5	78,3	80,2					
KRO	7601. QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga												
RO	7601. QDB. 231	Kab/Kota yang Mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter jenjang SD		Lemba- ga	514	514	514	514	514					
RO	7601. QDB. 233	Kab/Kota yang Melaksanakan Program UKS jenjang SD		Lemba- ga	514	514	514	514	514					
RO	7601. QDB. 238	Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan implementasi Kurikulum dan Model		Lemba- ga	514	514	514	514	514					

Keterangan	Progr-am/ Kegia-tan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Pembelajaran yang berlaku jenjang SD												
RO	7601. QDB. 280	Kab/kota yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu pada jenjang SD		Lemba- ga	514	514	514	514	514					
RO	7601. QDB. 281	SD yang Mendapatkan Pendampingan Digitalisasi Pembelajaran		Lemba- ga		14.953	14.953	14.953	14.953					
KRO	7601. RAA	Sarana Bidang Pendidikan												
RO	7601. RAA.2 93	SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran		Unit	14950 6									
Kegiata n	7602	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama	Pusat							1.361.831	280.571	288.988	297.658	306.588
SK	SK	Meningkatnya pembelajaran Sekolah Menengah Pertama yang berkualitas												
IKK	IKK	Persentase SMP yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum		persen	44,90	47,14	49,50	51,98	54,57					
IKK	IKK	Persentase SMP yang menerapkan kurikulum yang berlaku		persen	96,08	97,39	98,69	100,00	100,00					
IKK	IKK	Persentase SMP yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik		persen	62,93	65,95	72,38	73,86	75,74					
KRO	7602. QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga												
RO	7602. QDB. 331	Kab/Kota yang Mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter jenjang SMP		Lemba- ga	514	514	514	514	514					
RO	7602. QDB. 333	Kab/Kota yang Melaksanakan Program UKS jenjang SMP		Lemba- ga	514	514	514	514	514					
RO	7602. QDB. 338	Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan implementasi Kurikulum dan Model Pembelajaran yang berlaku jenjang SMP		Lemba- ga	514	514	514	514	514					

Keterangan	Progr- -am/ Kegia- -tan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RO	7602. QDB. 380	Kab/kota yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu pada jenjang SMP		Lemba- ga	514	514	514	514	514					
RO	7602. QDB. 381	SMP yang Mendapatkan Pendampingan Digitalisasi Pembelajaran		Lemba- ga		4357	4357	4357	4357					
KRO	7602. RAA	Sarana Bidang Pendidikan												
RO	7602. RAA.3 93	SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran		Unit	43571									
Kegiatan	7603	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Atas	Pusat							508.864	252.151	259.716	267.507	275.532
SK	SK	Meningkatnya pembelajaran Sekolah Menengah Atas yang berkualitas												
IKK	IKK	Persentase SMA yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum		persen	40,09	42,09	44,19	46,4	48,72					
IKK	IKK	Persentase SMA yang menerapkan kurikulum yang berlaku		persen	96,19	97,46	98,73	100	100					
IKK	IKK	Persentase SMA yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik		persen	61,93	62,73	63,53	64,33	65,13					
KRO	7603. QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga												
RO	7603. QDB. 431	Prov/Kab/Kota yang Mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter jenjang SMA		Lemba- ga	74	74	74	74	74					
RO	7603. QDB. 433	Prov/Kab/Kota yang Melaksanakan Program UKS jenjang SMA		Lemba- ga	74	74	74	74	74					
RO	7603. QDB. 438	Prov/Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan implementasi Kurikulum dan Model Pembelajaran yang berlaku jenjang SMA		Lemba- ga	74	74	74	74	74					

Keterangan	Progr- am/ Kegia- -tan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RO	7603. QDB. 480	Prov/Kab/kota yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu pada jenjang SMA		Lemba- ga	74	74	74	74	74					
RO	7603. QDB. 481	SMA yang Mendapatkan Pendampingan Digitalisasi Pembelajaran		Lemba- ga		1487	1487	1487	1487					
KRO	7603. RAA	Sarana Bidang Pendidikan												
RO	7603. RAA.4 93	SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran		Unit	14866									
Kegiata n	7605	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen	UPT							244.433	537.185	553.301	569.900	586.997
SK	SK	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen												
IKK	IKK	Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran		persen	64,06	65,34	66,64	67,98	69,34					
IKK	IKK	Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan		persen	57,61	67,75	72,64	77,72	82,61					
KRO	7605. QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga												
RO	7605. QDB. 750	Satuan PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya		Lemba- ga	41264 7	41264 7	412647	412647	412647					
RO	7605. QDB. 850	Pemda yang Mendapatkan Pendampingan Penerapan SPM Pendidikan		Lemba- ga		552	552	552	552					
Progra m	WA	Program Dukungan Manajemen								1.014.380	1.408.216	1.450.463	1.493.977	1.538.796
SP	SP	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian												
IKP	IKP 5.1.2 1	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah		Katego- ri	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik					

Keterangan	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RO	7606. EBB. 951	Layanan Sarana Internal		Unit		39	39	39	39					
RO	7606. EBB. 971	Layanan Prasarana Internal		Unit	39	39	39	39	39					
KRO	7606. EBC	Layanan Manajemen SDM Internal												
RO	7606. EBC. 954	Layanan Manajemen SDM		Orang	3500	3500	3500	3500	3500					
KRO	7606. EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal												
RO	7606. EBD. 952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		Dokumen	30	30	30	30	30					
RO	7606. EBD. 953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Dokumen	47	47	47	47	47					
RO	7606. EBD. 955	Layanan Manajemen Keuangan		Dokumen	26	26	26	26	26					